

BAB I

PENDAHULUAN

*"Pengetahuan, perbandingan, membuat orang tahu tempatnya sendiri,
dan tempat orang lain, gelisah dalam alam perbandingan."*

~ Pramodya Ananta Toer ~

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pers di Indonesia selalu diwarnai persoalan dari waktu ke waktu. Selama beberapa periode pemerintahan, pers sudah mengalami pembungkaman suara karena tekanan dari penguasa. Pada masa kolonialisme, pers diawasi secara ketat agar tidak mengobarkan semangat anti pemerintah dan melakukan perlawanan. Di masa pemerintahan Soekarno, pers mengalami pasang surut perkembangan, khususnya dalam hal regulasi media. Keran kebebasan pers sempat dibuka dengan asas kebebasan berpendapat sesuai dengan amanat Pancasila. Namun, pemerintah kemudian mengingkarinya dengan aturan yang membelenggu. Pers diintervensi oleh pemerintah untuk menjadi corong penguasa melakukan dominasi politik. Orde Baru yang bertumpu pada sistem otoriter lebih represif lagi terhadap pihak media. Pembredelan dan tindakan kekerasan terhadap jurnalis sering terjadi. Hal ini bertujuan untuk menutupi keburukan penguasa dan kaum kapitalis yang menjadi sahabat dekat pemerintah dan sumber dananya sekaligus.¹

Di era reformasi, dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999, pers diberi ruang kebebasan untuk menjadi pewarta kebenaran, dan pengumpul serta penyalur pendapat massa. Namun belakangan ini, khususnya pada masa pemerintahan Jokowi, isu penyempitan ruang berekspresi dan

¹ Inge Hutagulung, "Dinamika Sistem Pers di Indonesia", *Jurnal Interaksi*, 2:2, (Semarang: Juli 2013), hlm. 56-47.

kebebasan pers kembali terdengar, yang ditandai dengan indeks demokrasi yang mengalami tren penurunan. Menurut laporan lembaga *Economist Intelligence Unit* (EIU), yang dikutip media *Tempo.co*, selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, demokrasi Indonesia tidak beranjak dari status demokrasi cacat. Salah satu indikator yang digunakan EIU untuk menentukan indeks demokrasi adalah terjaminnya kebebasan pers dan mengajukan pendapat di ruang publik.² Dari sini dapat disimpulkan, kebebasan pers mengalami tren penurunan atau semakin terdesak untuk tidak bersuara. Bagaimana dengan kondisi sekarang, di era kepemimpinan Prabowo?

Setelah Prabowo melewati tahun pertama memimpin Indonesia atau satu tahun masa pemerintahannya per tanggal 20 Oktober 2025, indeks demokrasi Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan. Dalam laman webnya, media *BBC News Indonesia* secara ringkas merangkum peristiwa, pendapat beberapa tokoh, dan hasil riset beberapa lembaga yang menggambarkan keadaan demokrasi selama Prabowo memimpin dan potensi keadaan negeri ini kedepannya. Sekalipun tidak memberikan kesimpulan, media ini menggambarkan bahwa terjadi usaha penyempitan ruang berekspresi yang diindikasikan peristiwa seperti penangkapan beberapa aktivis dan hampir seribu anggota demo dari kalangan mahasiswa, pernyataan Prabowo tentang “demokrasi santun”, dan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.³ AJI juga melaporkan adanya aksi swasensor dari pihak media dan jurnalis akibat tekanan di ruang redaksi dari penguasa dan intimidasi terhadap jurnalis saat menjalankan tugas di lapangan dari aparat keamanan (TNI dan polisi).⁴ Mengapa atau apa yang menyebabkan pers bersinggungan dengan kekuasaan?

Pers memiliki peran penting sebagai pengawas pemerintahan. Pengawas berarti meneropong, mengkaji, dan memberitakannya kepada masyarakat. Di sini,

² Artika Rachmi Farmita, “Demokrasi Indonesia di Bawah 10 Tahun Pemerintahan Jokowi”, dalam *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/data/data/demokrasi-indonesia-di-bawah-10-tahun-pemerintahan-jokowi-246153>, diakses pada 15 April 2026.

³ Redaksi BBC News Indonesia, “Setahun Prabowo-Gibran: 'Arah balik demokrasi' dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi ke depan?”, dalam *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce86yln4nmro>, diakses pada 15 April 2026.

⁴ Aliansi Jurnalis Independen, “Catatan Tahun 2025: Pers dalam Pusaran Otoritarian”, dalam *Siaran Pers AJI Indonesia*, <https://aji.or.id/informasi/catatan-tahun-2025-pers-dalam-pusaran-otoritarian>, diakses pada 15 April 2026.

pers tidak hanya menjadi pihak pemantau tetapi membantu masyarakat melihat dan mengetahui arah kebijakan pemerintah dan mengambil bagian dalam proses pemerintahan yang berjalan. Jika pers dibatasi untuk tidak mengakses momen dan tempat kebijakan di negeri ini dibuat, masyarakat juga sulit mendapatkan informasi yang benar dari ranah kekuasaan. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah dan sulit berpartisipasi di dalamnya.⁵ Selain itu, jika kebebasan berpendapat dibatasi, termasuk melalui pers, pemerintah akan rentan melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat.⁶

Persoalan di dunia pers juga muncul dari ekonomi media. Di satu sisi, pers merupakan lembaga sosial yang melayani kepentingan massa, di sisi lain, ia juga merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi untuk menghasilkan surplus ekonomi. Kegiatan ini tidak bertentangan dengan tugas dasarnya sejauh ia tetap menjaga kredibilitasnya dalam menyebarkan informasi. Namun, persoalan muncul ketika pers lebih memperhatikan keuntungan ekonomi dan mengabaikan kualitas informasi. Di era digital saat ini, kecepatan (*update*) dan daya pikat (*sensasional*) menjadi tolak ukur media (pers) dibandingkan ketepatan (akurasi berdasarkan investigasi) dan kegunaan (manfaat) dari informasi yang disebarluaskan. Pers menyesuaikan diri dengan iklim pasar platform digital yang menuntut informasi yang serba cepat dan bombastis untuk memikat interaksi dari pengguna media, khususnya di platform digital, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan fungsinya sebagai media edukasi dan pengontrol kekuasaan. Jurnalis yang menjadi tulang punggung berita tergoda untuk mengambil berita dari *citizen journalism*, tanpa melakukan peliputan langsung suatu peristiwa dan menyebarkan berita remeh-teme hanya untuk memenuhi tuntutan pasar. Pers, dan jurnalis secara khusus, menjadi pelengkap kesimpangsiuran informasi dan *hoax* yang sering menjadi patologi di jagat digital.⁷

Gambaran singkat mengenai persoalan di dunia pers, seperti yang dijelaskan di atas, menarik beberapa peneliti untuk mengkaji persoalan tersebut

⁵ Syafriadi, *Demokrasi dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Bina Karya, 2023), hlm. 128-130.

⁶ Najwa Shihab, "Merawat Demokrasi dengan Memerangi Korupsi", dalam Muhammad Taufiqurohman, *Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera: Cerita-cerita yang Tak Jadi Berita* (Jakarta: Tempo, 2018), hlm. xi-xii.

⁷ Yulius Rudi Haryanto, "Pembacaan Ekonomi Politik atas Praktik Cloning Journalism di Era Digital", *Akademika*, 20:2 (Maumere, Januari 2022), hlm. 24-28.

dalam bentuk artikel jurnal dan skripsi, khususnya berkaitan dengan peran jurnalis. Berikut beberapa penelitian tentang peran jurnalis di dunia publikasi atau penyiaran informasi:

- 1) Artikel jurnal yang ditulis oleh Agung Priyo Wicaksono berjudul, “Peran Ganda Jurnalis dan Penyimpangan Kode Etik Jurnalistik”. Wicaksono menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan data melalui *Focus Group Discussion* dan wawancara. Persoalan yang coba diteliti ialah kehadiran platform digital yang memberi tekanan pada media konvensional, rendahnya penghasilan jurnalis, dan pola rekrutmen jurnalis, serta dampaknya terhadap profesionalisme jurnalis. Hasil penelitian Wicaksono menunjukkan bahwa kehadiran platform digital menyebabkan krisis ekonomi bagi media konvensional sehingga tidak mampu memberikan upah yang cukup untuk jurnalis. Akibatnya, jurnalis melakukan tugas ganda, yaitu bekerja untuk mengumpulkan informasi dan mencari sendiri pihak-pihak yang mau menyewa jasa mereka menulis dan menyebarkan iklan. Dalam hal ini, jurnalis kemudian tunduk pada kemauan penyewa jasa mereka dan mengabaikan kredibilitas dan keakuratan informasi. Hal ini bertentangan dengan tugas dasar jurnalis dan kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, media tempat mereka bekerja juga tidak menjalankan fungsinya dengan baik.⁸
- 2) Artikel jurnal yang ditulis oleh Yulius Rudi Haryanto berjudul, “Pembacaan Ekonomi Politik atas Praktik *Cloning Journalism* di Era Digital”. Haryanto menggunakan teori ekonomi politik dari Vincent Moscow untuk menganalisis fenomena *cloning journalism* (jurnalisme kloning) yang marak terjadi di era digital. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa di era digital, banyak jurnalis atau pekerja media baru (media *online* yang dimanfaatkan jadi tempat penyebaran berita pers seperti *Tempo.co* dan *Kompas.id*) mengambil konten yang sedang ramai dibicarakan (viral) dari pengguna media sosial, dipoles sedikit dan dikemas ulang, kemudian disebarkan menjadi berita tanpa turun langsung

⁸ Agung Priyo Wicaksono, “Peran Ganda Jurnalis dan Penyimpangan Kode Etik Jurnalistik”, *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 19:1 (Yogyakarta: April 2023), hlm. 59-67.

mencari dan memastikan keakuratan peristiwa yang terjadi. Jurnalis lebih mementingkan jumlah klik pada konten yang disebar di media untuk memperoleh manfaat ekonomi dibandingkan dengan keakuratannya melalui investigasi langsung di lapangan. Hal ini menyebabkan informasi yang disebar tidak mendalam dan akurat.⁹

- 3) Artikel jurnal yang ditulis oleh Masduki dan Engelbertus Wendratama berjudul, “*Digital Activism for Press Freedom Advocacy in Post-Authoritarian Indonesia.*” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada peran aktivisme digital yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, aktivis sosial, dan media profesional untuk membela kebebasan pers di Indonesia serta hambatannya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia dapat diperjuangkan dengan kerja sama semua masyarakat dari berbagai kalangan melalui media digital, seperti membuat petisi dan siaran pers, serta penggalangan dana untuk aktivisme itu sendiri. Gerakan ini mencakup usaha melindungi pekerja media dari tekanan penguasa yang memaksanya tidak lantang bersuara.¹⁰
- 4) Skripsi yang ditulis oleh Tarsisius Jebaru berjudul, “Peran Pers dalam Upaya Memberantas Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia”. Skripsi ini menyoroti peran pers dalam upaya memberantas tindakan korupsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pers memiliki kapasitas untuk memberantas tindakan korupsi dengan cara memberitakan kasus korupsi secara terus menerus, mengedukasi masyarakat untuk memahami politik dan memilih pemimpin yang bersih, menjadi pengontrol kebijakan pemerintah, dan mengusahakan transparansi pemerintah dengan mencari informasi terkait penggunaan dana pemerintahan dan tender-tender proyek untuk diketahui masyarakat. Hal

⁹ Yulius Rudi Haryanto, *op. cit.*, hlm. 21-37.

¹⁰ Maduki dan Engelbertus Wendratama, “Digital Activism for Press Freedom Advocacy in Post-Authoritarian Indonesia”, dalam *Journalism and Media*, 6:3, Juli 2025, <https://doi.org/journalmedia6030101>, diakses pada 20 Maret 2026.

ini mengandaikan bahwa jurnalis atau pekerja media dan pers secara umum, bekerja secara profesional.¹¹

Keempat penelitian di atas patut dijadikan acuan untuk melihat peran dan tantangan yang dihadapi jurnalis. Wicaksono menggambarkan situasi dilematis di tengah persaingan media konvensional dan media baru yang menyebabkan jurnalis terkadang melanggar etika profesinya. Hal yang hampir sama juga ditemukan oleh Haryanto dalam penelitiannya, dengan menggunakan pisau analisis teori ekonomi politik Vincent Moscow. Kedua penelitian ini membantu penulis melihat posisi jurnalis di era digital. Artikel dari Masduki dan Wendratama menunjukkan bahwa media digital dapat membantu mengumpulkan suara massa dan aktivis sosial untuk memperjuangkan kebebasan pers dan mendukung pekerja media untuk menyampaikan kebenaran dengan bebas. Artikel ini menyumbangkan solusi alternatif yang juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam tulisan ini. Mengambil sisi tilik dan persoalan yang berbeda, Jebaru memfokuskan penelitiannya pada potensi besar jurnalis sebagai pengawas pemerintahan, khususnya dalam menentang praktik korupsi. Penelitiannya membantu penulis melihat hubungan kekuasaan dan pers, khususnya jurnalis yang berperan di dalamnya. Namun, berbeda dari keempat penelitian di atas, penulis ingin mengkaji peran jurnalis lebih jauh dengan bertitik tolak pada karya sastra. Mengapa karya sastra?

Sastra bukan hanya karya imajinatif semata yang tidak bertumpu pada realitas kehidupan. Karya sastra lahir dalam konteks kehidupan tertentu yang menjiwai pengarangnya. Puisi-puisi M. Yamin, misalnya, yang dikenal sebagai tokoh nasional dan pelopor puisi bergaya soneta, menggambarkan peralihan gerakan pemuda nasionalis yang semula terarah pada daerahnya sendiri kemudian atas nama bangsa Indonesia.¹² Karya sastra bahkan menjadi saksi sejarah yang mengabadikan momen-momen penting peristiwa di masa lalu, seperti *Negarakertagama* karya Prapanca, yang menguak kisah kehidupan di era

¹¹ Tarsisius Jebaru, "Peran Pers dalam Upaya Memberantas Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia" (Skripsi Sarjana, Program Studi Filsafat IFTK Ledalero, Maumere, 2021), hlm. 1-76.

¹² Sunu Wasono, "Muhammad Yamin: Penyair Puisi Modern Indonesia", dalam Sapardi Djoko Damono (ed.), *Jejak Pengarang dalam Sastra Indonesia (1880-1980)* (Jakarta: LIPI Press, 2018) hlm. 9-27.

kejayaan kerajaan Majapahit. Menurut Seno Gumira Ajidarma, karya sastra anti terhadap pemalsuan sejarah atau historisme, sejarah yang digunakan untuk membenarkan kekuasaan. Ia lahir dari visi di dalam kepala pengarang yang anti terhadap pemalsuan sejarah.¹³ Selain itu, karya sastra juga sering digunakan sebagai senjata kritik sosial sehingga terkadang dilarang peredarannya, dan pengarangnya digiring ke penjara seperti yang dialami W.S Rendra dan Pramoedya Ananta Toer.¹⁴

Dari uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran jurnalis di Indonesia saat ini dari karya sastra yang ditulis oleh penulis terkenal Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, yaitu novel *Jejak Langkah*. Penulis secara khusus menyoroti perjuangan tokoh utama dalam novel ini, Minke, untuk menegakkan keadilan bagi pribumi melalui pers dan organisasi, yang masih relevan bagi perjuangan jurnalis di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, penulis merangkai tulisan ini dengan judul, **“PERJUANGAN TOKOH MINKE DALAM NOVEL JEJAK LANGKAH KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER DAN RELEVANSINYA BAGI JURNALIS DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari ulasan latar belakang di atas, persoalan utama yang berusaha dijawab dalam tulisan ini adalah apa relevansi perjuangan tokoh Minke dalam novel *Jejak Langkah* karya Pramoedya Ananta Toer bagi jurnalis di Indonesia? Penjabaran dari persoalan tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Apa unsur pembentuk novel *Jejak Langkah*?
- 2) Bagaimana realitas jurnalis di Indonesia?
- 3) Bagaimana Perjuangan Tokoh Minke dalam novel *Jejak Langkah* dan apa relevansinya bagi Jurnalis di Indonesia?

¹³ Seno Gumira Ajidarma, *Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005) hlm. 1-8.

¹⁴ Sapardi Djoko Damono, *Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm. 15-18.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan karya ilmiah ini adalah untuk:

- 1) Mendeskripsikan dan menjelaskan unsur pembentuk novel *Jejak Langkah*.
- 2) Mendeskripsikan dan menjelaskan realitas jurnalis di Indonesia.
- 3) Mendeskripsikan dan menjelaskan perjuangan tokoh Minke dalam novel *Jejak Langkah* dan relevansinya bagi jurnalis di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

- 1) Menginspirasi jurnalis dalam menjalankan profesinya.
- 2) Masyarakat dan pemerintah memahami tentang pentingnya peran jurnalis dan tergerak untuk membantu mereka dalam menjalankan tugasnya atau bersifat kooperatif.
- 3) Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema yang sama dengan tulisan ini.

1.5 Metode Penulisan

Karya ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Penulis menggunakan novel *Jejak Langkah* sebagai sumber primer penelitian dan beberapa literatur dari perpustakaan serta internet sebagai sumber sekunder untuk memahami persoalan yang dibahas dan menemukan pemecahannya. Penulis secara teliti membaca novel *Jejak Langkah* untuk memahami maknanya dan mencari sumber acuan yang dapat digunakan atau

relevan untuk memperjelas persoalan dan membentuk argumentasi logis yang bermanfaat bagi pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya ini merupakan kajian ilmiah yang tersusun secara sistematis dalam lima bab dengan alur pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan. Pada bab ini, penulis secara singkat membahas latar belakang, tujuan, metode, dan sistematika penulisan karya ilmiah ini.

BAB II berisi penjelasan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik novel *Jejak Langkah*. Penulis juga secara singkat membahas biografi pengarang novel *Jejak Langkah*, Pramoedya Ananta Toer.

BAB III berisi tentang peran dan fungsi jurnalis di dalam dunia penerbitan atau penyiaran berita dan peran pentingnya bagi publik, serta persoalan yang dihadapi jurnalis di Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pada bagian ini, penulis juga menjelaskan secara singkat definisi pers, jurnalistik, dan jurnalis, supaya pembaca memahami ketiga istilah tersebut dan mampu menggarungi pembahasan pada bab berikutnya dengan lebih baik.

BAB IV merupakan inti dari tulisan ini. Pada bagian ini, penulis akan menjawab persoalan yang menjadi fokus tulisan ini yaitu latar belakang, bentuk-bentuk, dan relevansi perjuangan tokoh Minke dalam novel *Jejak Langkah* bagi jurnalis di Indonesia.

Pada *BAB V*, penulis menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca.